

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "**Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah**" ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akademik sekaligus sebagai upaya memperdalam pemahaman tentang perkembangan praktek siyasah (politik pemerintahan) dalam sejarah peradaban Islam. Dalam makalah ini, penulis menguraikan pengertian siyasah, pelaksanaan siyasah pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, perbandingan keduanya, serta kesimpulan dari analisis tersebut.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta semua pihak yang ingin memahami dinamika politik dalam sejarah Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMBUTAN..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| BAB II. PEMBAHASAN..... | 3 |
| A. Pengertian Siyasah | 3 |
| B. Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Umayyah..... | 3 |
| C. Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Abbasiyah | 6 |
| D. Perbandingan Siyasah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah | 8 |
| BAB III. PENUTUP..... | 11 |
| A. KESIMPULAN..... | 11 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 12 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perjalanan sejarah Islam, siyasah atau politik menjadi instrumen penting dalam membangun, mengembangkan, dan mempertahankan kekuasaan umat Islam. Konsep siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan semata, tetapi juga erat kaitannya dengan penerapan nilai-nilai syariat dalam pemerintahan. Sejak masa Khulafaur Rasyidin, Islam telah meletakkan dasar-dasar etis dalam pemerintahan. Namun, dengan berdirinya Dinasti Umayyah dan kemudian Dinasti Abbasiyah, praktek siyasah mengalami perubahan besar yang mencerminkan kebutuhan politik, sosial, dan budaya pada masanya.

Dinasti Umayyah, yang berkuasa dari tahun 661 hingga 750 M, memperkenalkan sistem monarki herediter dalam pemerintahan Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti ini, mengubah model kepemimpinan yang semula bersifat kolektif berdasarkan syura menjadi sistem dinasti yang diwariskan turun-temurun (Hitti, 2002). Perubahan ini menimbulkan berbagai respon di kalangan umat Islam, dari penerimaan hingga perlawanan. Dinasti Umayyah juga dikenal memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan, namun di sisi lain menghadapi kritik karena perlakuan diskriminatif terhadap non-Arab Muslim (*mawali*), serta cenderung memusatkan kekuasaan pada kelompok elit Arab Quraisy.

Berkaca pada kondisi tersebut, lahirlah Dinasti Abbasiyah yang berhasil menggulingkan Umayyah dan berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 M. Abbasiyah membawa model siyasah yang lebih inklusif terhadap berbagai etnis, terutama bangsa Persia, yang selama ini merasa termarginalkan (Lapidus, 2014). Pemerintahan Abbasiyah memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir, memperluas peran ulama dan cendekiawan dalam negara, serta memberikan perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Meskipun pada awalnya berhasil menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial, pada masa-masa selanjutnya Abbasiyah juga mengalami kemunduran akibat melemahnya otoritas pusat dan meningkatnya kekuasaan dinasti-dinasti lokal.

Studi tentang praktek siyasah di kedua dinasti ini sangat penting untuk memahami perkembangan konsep politik dalam Islam. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana adaptasi dan inovasi politik diterapkan dalam berbagai situasi historis yang berbeda. Praktik siyasah Umayyah dan Abbasiyah menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan tantangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Al-Mawardi, 2010).

Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan siyasah dalam dua dinasti besar Islam tersebut. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara kritis kelebihan dan kekurangan masing-masing dinasti dalam menerapkan siyasah, serta bagaimana warisan politik mereka mempengaruhi perkembangan dunia Islam di masa selanjutnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Siyasah ?
2. Bagaimana Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Umayyah ?
3. Bagaimana Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Abbasiyah ?
4. Apa Perbandingan Siyasah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah ?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Apa Pengertian Siyasah
2. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Umayyah
3. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek Siyasah pada Masa Dinasti Abbasiyah
4. Untuk mengetahui Apa Perbandingan Siyasah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SIYASAH

Secara etimologis, *siyasah* berasal dari bahasa Arab yaitu *saasa-yasiisu-siyaasatan*, yang berarti mengurus, mengatur, memimpin, dan memperbaiki keadaan masyarakat (Al-Mawardi, 2010). Dalam terminologi Islam, *siyasah* dipahami sebagai upaya mengelola urusan umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Menurut para ulama, *siyasah* dalam Islam tidak hanya berarti aktivitas politik dalam arti sempit, melainkan mencakup semua usaha untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, memelihara hak-hak individu dan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan hukum syariat dalam kehidupan bernegara. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan bahwa *siyasah* berkaitan erat dengan tugas-tugas pemerintahan seperti menjaga agama, mengatur dunia, dan mengelola urusan rakyat (Al-Mawardi, 2010).

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* juga mengemukakan bahwa *siyasah* bertujuan untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat, menghilangkan kezaliman, dan mengatur hubungan antar manusia berdasarkan hukum syariat (Ibn Khaldun, 2015). Ia memandang bahwa pemerintahan yang sah harus berbasis pada prinsip-prinsip agama dan moral.

Dalam praktiknya, *siyasah* Islam mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari pengangkatan pemimpin, pengaturan keuangan negara (*baitul mal*), sistem peradilan, hubungan luar negeri, hingga pembinaan masyarakat. *Siyasah* tidak dipahami sebagai alat untuk mengejar kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan umat dan memenuhi tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Kamali, 2008).

Dengan demikian, *siyasah* dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), konsultasi (*syura*), persamaan hak, dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan. Setiap bentuk kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dianggap sebagai bagian dari *siyasah* Islam.

B. PRAKTEK SIYASAH PADA MASA DINASTI UMAYYAH

Dinasti Umayyah (661–750 M) menandai fase penting dalam perkembangan politik Islam. Pada masa ini, praktek *siyasah* mengalami perubahan besar dari sistem khilafah yang

berbasis musyawarah menjadi bentuk monarki herediter. Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri Dinasti Umayyah, mengubah konsep kepemimpinan umat dari pemilihan terbuka menjadi sistem kekuasaan turun-temurun, dengan dalih menjaga stabilitas politik dan menghindari pertumpahan darah (Hitti, 2002).

1. Perubahan Sistem Pemerintahan

Salah satu karakteristik utama siyasah Dinasti Umayyah adalah transformasi sistem pemerintahan menjadi kerajaan Islam yang pertama. Para khalifah Umayyah mengukuhkan kekuasaan mereka dengan membentuk struktur pemerintahan yang hierarkis dan terpusat. Jabatan khalifah diwariskan kepada keluarga sendiri, mengakhiri tradisi pemilihan terbuka di antara umat Islam yang pernah diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin (Lapidus, 2014).

Muawiyah memperkenalkan konsep **wilayat al-'ahd**, yakni pengangkatan putra mahkota untuk melanjutkan kekuasaan. Praktik ini kemudian menjadi standar baru dalam pengalihan kekuasaan di dunia Islam, meski menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang merasa dikebiri hak politiknya (Donner, 2010).

2. Sentralisasi dan Administrasi Pemerintahan

Dalam aspek administrasi, Dinasti Umayyah memperkuat birokrasi negara. Mereka membagi pemerintahan menjadi beberapa departemen (*diwan*), seperti *diwan al-kharaj* (urusan pajak), *diwan al-jund* (urusan militer), dan *diwan al-rasa'il* (urusan surat-menyurat). Gubernur-gubernur (*wali*) ditunjuk langsung oleh khalifah dan diberi kekuasaan luas dalam mengelola provinsi (Kennedy, 2016).

Salah satu inovasi besar adalah penyeragaman bahasa Arab sebagai bahasa administrasi di seluruh wilayah kekuasaan, menggantikan bahasa-bahasa lokal seperti Yunani dan Persia. Penyeragaman ini memperkuat identitas budaya dan politik Islam di seluruh wilayah (Hitti, 2002).

3. Kebijakan Ekonomi dan Pajak

Dalam bidang ekonomi, Dinasti Umayyah menerapkan sistem pajak yang cukup kompleks. Kaum non-Muslim (*dzimmi*) dikenai pajak khusus seperti *jizyah* (pajak perlindungan) dan *kharaj* (pajak tanah), sedangkan Muslim diwajibkan membayar zakat. Namun, dalam praktiknya, ketidakadilan sering terjadi, terutama terhadap kaum mawali (Muslim non-Arab), yang tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua dan dibebani pajak yang berat (Kennedy, 2016).

Kebijakan fiskal ini menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan, memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat non-Arab yang akhirnya berkontribusi terhadap kejatuhan Dinasti Umayyah (Lapidus, 2014).

4. Praktek Hukum dan Peradilan

Sistem peradilan pada masa Umayyah menunjukkan dualisme antara hukum Islam dan kebijakan politik. Qadhi (hakim) ditunjuk untuk menjalankan hukum syariat Islam, namun sering kali keputusan mereka dipengaruhi oleh kehendak politik penguasa. Di sisi lain, khalifah sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan negara meskipun belum ada ketentuannya dalam syariat (Al-Mawardi, 2010).

Dengan demikian, siyasah pada masa ini berupaya menyeimbangkan antara keperluan syariat dan kebutuhan praktis pemerintahan.

5. Politik Ekspansi dan Militer

Ekspansi wilayah menjadi salah satu pilar utama praktek siyasah Dinasti Umayyah. Mereka memperluas kekuasaan Islam ke Afrika Utara, Spanyol (Andalusia), India, dan Asia Tengah. Kampanye militer ini, selain bertujuan menyebarkan Islam, juga bermotif memperkuat kekuasaan politik dan memperbesar sumber pendapatan negara melalui pajak dan rampasan perang (Donner, 2010).

Khalifah-khalifah seperti Al-Walid I dan Umar bin Abdul Aziz memainkan peran penting dalam ekspansi dan konsolidasi wilayah. Meski demikian, ekspansi yang cepat juga memperbesar beban administrasi dan memperuncing ketidakpuasan sosial di wilayah-wilayah baru.

6. Isu Sosial dan Ketidakadilan

Salah satu kelemahan utama siyasah Dinasti Umayyah adalah perlakuan diskriminatif terhadap kaum mawali. Kaum Muslim non-Arab diperlakukan tidak setara dengan Muslim Arab, terutama dalam hak sosial dan akses kepada jabatan pemerintahan. Ketidakadilan ini melahirkan gerakan perlawanan di berbagai daerah yang kemudian mendukung munculnya Dinasti Abbasiyah (Lapidus, 2014).

Selain itu, sikap otoriter sebagian khalifah Umayyah menimbulkan sentimen anti-dinasti di kalangan kelompok-kelompok keagamaan seperti Syiah dan Khawarij.

Praktek siyasah pada masa Dinasti Umayyah menunjukkan upaya besar dalam membangun negara Islam yang terorganisir secara administratif dan militer. Namun, transformasi dari sistem syura ke monarki, praktik diskriminasi sosial, dan ketegangan internal menjadi faktor utama yang melemahkan fondasi kekuasaan mereka. Siyasah Umayyah, meskipun berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, akhirnya membawa kepada perubahan besar dalam sejarah Islam melalui kejatuhan mereka dan berdirinya Dinasti Abbasiyah.

C. PRAKTEK SIYASAH PADA MASA DINASTI ABBASIYAH

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) menandai era baru dalam sejarah pemerintahan Islam, yang membawa perubahan besar dalam konsep siyasah (politik pemerintahan). Tidak seperti Dinasti Umayyah yang cenderung berbasis kearaban (*Arabism*), Dinasti Abbasiyah menerapkan politik inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok etnis, khususnya orang-orang non-Arab seperti Persia. Pendekatan ini berpengaruh besar terhadap dinamika politik, administrasi, dan budaya Islam (Lapidus, 2014).

1. Sistem Kekuasaan dan Legitimasi Politik

Dalam praktek siyasah Abbasiyah, kekuasaan khalifah tetap dianggap sebagai manifestasi dari kehendak ilahi (*al-imamah*) dan berakar dari konsep khilafah. Akan tetapi, legitimasi mereka diperkuat melalui simbolisme agama yang lebih kuat, termasuk menonjolkan status sebagai keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, untuk mengklaim kedekatan spiritual dan darah dengan Nabi (Kennedy, 2016).

Khalifah Abbasiyah memposisikan diri tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung agama. Peran ini memperkuat keabsahan kekuasaan mereka di mata umat Islam.

2. Struktur Administrasi dan Birokrasi

Dinasti Abbasiyah mengembangkan struktur birokrasi yang sangat kompleks dan terorganisir. Mereka membentuk sistem *diwan* yang lebih rapi, dipimpin oleh wazir (perdana menteri) yang memegang kekuasaan administratif dan politik yang besar (Donner, 2010).

Para wazir, seperti keluarga Barmakid, memainkan peran vital dalam pengelolaan negara. Selain itu, negara mengadopsi banyak model administrasi Persia, termasuk sistem pajak, korespondensi, dan pencatatan keuangan negara, yang membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan stabil (Lapidus, 2014).

3. Perkembangan Politik Wilayah

Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 M. Baghdad tumbuh menjadi pusat intelektual, budaya, dan ekonomi dunia Islam. Perpindahan ini mencerminkan pergeseran orientasi politik dari Arab ke Persia, yang mempengaruhi praktek siyasa Dinasti Abbasiyah (Kennedy, 2016).

Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan pusat semakin melemah, dan banyak wilayah jauh seperti Spanyol, Maroko, Mesir, dan Persia mulai memproklamasikan otonomi, walaupun secara nominal tetap mengakui kekuasaan khalifah Abbasiyah.

4. Siyasa dan Peran Militer

Pada masa Abbasiyah, militer memainkan peran sangat penting dalam politik. Khalifah-khalifah Abbasiyah membentuk pasukan profesional seperti tentara Mamluk (budak militer) dan pasukan Turki. Rekrutmen ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada kabilah Arab yang sering memberontak (Donner, 2010).

Namun, dalam perkembangannya, ketergantungan pada pasukan militer non-Arab ini justru memperlemah kekuasaan khalifah. Para panglima militer seringkali memiliki kekuasaan *de facto* yang melebihi khalifah sendiri, sehingga muncul istilah "khalifah bayangan" yang menunjukkan lemahnya otoritas pusat.

5. Politik Intelektual dan Kebijakan Keagamaan

Dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, terkenal dengan kebijakan siyasa berbasis intelektualisme. Al-Ma'mun mendirikan *Bayt al-Hikmah* (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad sebagai pusat penerjemahan, riset ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan (Hitti, 2002).

Namun, Al-Ma'mun juga memaksakan ideologi *Mu'tazilah* sebagai doktrin resmi negara, terutama dalam *Mihnah* (inquisisi) yang menguji para ulama tentang keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Politik keagamaan ini memicu kontroversi besar dan memperlemah legitimasi spiritual khalifah di mata banyak umat Islam ortodoks (Kennedy, 2016).

6. Siyasa dan Krisis Kekuasaan

Mulai abad ke-9, Dinasti Abbasiyah menghadapi krisis serius akibat melemahnya otoritas pusat dan meningkatnya kekuasaan daerah. Banyak wilayah seperti Samarra,

Khorasan, dan Mesir memberontak dan membentuk dinasti sendiri seperti Tuluniyah, Ikhshidiyah, dan Fatimiyah.

Pada periode ini, praktek siyasah lebih banyak berorientasi pada upaya mempertahankan kekuasaan simbolis khalifah, sedangkan kekuasaan riil banyak dipegang oleh amir-amir daerah atau para panglima militer (Lapidus, 2014).

Pada akhirnya, Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol pada 1258 M, menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, meskipun sisa dinasti ini bertahan secara simbolik di Kairo di bawah proteksi Mamluk.

Praktek siyasah Dinasti Abbasiyah menunjukkan kemajuan besar dalam sistem administrasi, intelektualisme, dan ekspansi kebudayaan Islam. Namun, kompleksitas pemerintahan, ketergantungan pada militer non-Arab, intervensi ideologi agama, dan lemahnya kontrol daerah menyebabkan kemunduran kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini tetap dikenang sebagai era kejayaan intelektual Islam meskipun secara politik menghadapi tantangan berat sepanjang eksistensinya.

D. PERBANDINGAN SIYASAH DINASTI UMAYYAH DAN ABBASIYAH

Perbandingan praktek siyasah antara Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam konsep pemerintahan, basis sosial, pendekatan politik, serta relasi antara kekuasaan agama dan negara. Kedua dinasti ini sama-sama berusaha mempertahankan kekuasaan dan memperluas pengaruh Islam, namun dengan karakteristik siyasah yang berbeda (Lapidus, 2014; Kennedy, 2016).

1. Basis Sosial dan Legitimasi Kekuasaan

Pada masa Umayyah, kekuasaan sangat didominasi oleh bangsa Arab. Dinasti ini menerapkan *politik Arabisasi*, di mana suku-suku Arab ditempatkan pada posisi utama dalam birokrasi dan militer. Legitimasi mereka lebih berbasis pada kekuatan militer dan tradisi kabilah (Kennedy, 2016).

Sebaliknya, Dinasti Abbasiyah membuka peluang yang lebih luas bagi non-Arab, terutama bangsa Persia, untuk terlibat dalam pemerintahan. Legitimasi Abbasiyah bertumpu pada klaim hubungan darah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW (keturunan dari Al-Abbas) serta pendekatan religius yang lebih menonjol, sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok Muslim, termasuk kaum non-Arab (Lapidus, 2014).

2. Struktur Pemerintahan dan Administrasi

Struktur pemerintahan Umayyah cenderung sederhana dan bercorak kesukuan. Administrasi lebih mengutamakan loyalitas pribadi terhadap khalifah. Sementara itu, Abbasiyah membangun sistem administrasi yang jauh lebih kompleks dan profesional, mengadopsi model birokrasi Persia kuno, serta membentuk kementerian-kementerian (*diwan*) untuk mengelola berbagai urusan negara (Donner, 2010).

Di bawah Abbasiyah, jabatan wazir menjadi penting sebagai tangan kanan khalifah, sementara pada masa Umayyah, kekuasaan lebih bersifat langsung di tangan keluarga Bani Umayyah.

3. Politik Keagamaan

Dinasti Umayyah, khususnya pada awalnya, lebih menekankan aspek politik dibandingkan agama. Mereka memerintah dengan pendekatan duniawi dan seringkali dituduh mengabaikan prinsip keadilan Islam, yang akhirnya memicu pemberontakan dari kelompok Syiah dan Khawarij (Hitti, 2002).

Sebaliknya, Abbasiyah menggabungkan politik dengan simbolisme agama yang kuat. Mereka memposisikan khalifah sebagai pemimpin umat secara spiritual dan politik sekaligus. Akan tetapi, politik keagamaan ini kadang disalahgunakan, seperti terlihat dalam peristiwa *Mihnah* (inquisisi) saat Al-Ma'mun memaksakan doktrin *Mu'tazilah* sebagai akidah resmi negara (Kennedy, 2016).

4. Hubungan dengan Militer

Dalam Dinasti Umayyah, militer sebagian besar terdiri dari suku-suku Arab yang loyal kepada keluarga Umayyah. Sedangkan Abbasiyah mengandalkan pasukan non-Arab, termasuk pasukan budak (*Mamluk*) dan tentara Turki, untuk menjaga kekuasaan.

Kebergantungan Abbasiyah pada militer profesional ini awalnya memperkuat kekuasaan mereka, namun dalam jangka panjang justru melemahkan otoritas khalifah karena para panglima militer menjadi sangat berkuasa, bahkan mendominasi politik istana (Lapidus, 2014).

5. Pusat Kekuasaan dan Orientasi Politik

Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, dengan orientasi politik yang bercorak Arab dan berusaha mempertahankan identitas Arab dalam perluasan kekuasaan Islam.

Sebaliknya, Dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, yang lebih dekat dengan peradaban Persia dan memperlihatkan orientasi internasional serta kosmopolitan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya, menunjukkan bahwa Abbasiyah lebih menekankan integrasi budaya daripada identitas nasional (Kennedy, 2016).

Dinasti Umayyah dan Abbasiyah masing-masing mengembangkan bentuk siyasah yang berbeda sesuai dengan tantangan zamannya. Umayyah lebih bersifat Arab-sentris, sederhana, dan berbasis militer tradisional, sedangkan Abbasiyah lebih kosmopolitan, birokratis, dan menggunakan agama sebagai instrumen legitimasi yang lebih kuat. Perbedaan ini mencerminkan evolusi politik Islam dari sebuah kerajaan berbasis etnis menjadi imperium multi-etnis dan multi-budaya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Praktek siyasah (politik pemerintahan) pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Umayyah menekankan kekuasaan berbasis etnis Arab dengan struktur pemerintahan yang sederhana, militeristik, dan berfokus pada ekspansi wilayah. Kepemimpinan Umayyah didominasi oleh kekuatan suku dan loyalitas kabilah, sementara aspek keagamaan seringkali diposisikan sebagai legitimasi sekunder dalam politik mereka (Kennedy, 2016; Lapidus, 2014).

Sebaliknya, Dinasti Abbasiyah mengembangkan pemerintahan yang lebih kompleks dengan adopsi sistem birokrasi Persia, memperluas partisipasi politik non-Arab, dan mengintegrasikan kekuasaan politik dengan simbolisme keagamaan yang lebih kuat. Abbasiyah berhasil membawa dunia Islam memasuki masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan administrasi negara, meskipun pada akhirnya kekuasaan mereka juga melemah akibat fragmentasi politik dan dominasi militer (Donner, 2010; Hitti, 2002).

Perbandingan antara kedua dinasti ini menunjukkan bahwa perubahan dalam praktek siyasah sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tuntutan zaman. Dinasti Umayyah mewakili fase awal penataan kekuasaan Islam yang berorientasi ekspansi, sedangkan Abbasiyah menandai fase konsolidasi kekuasaan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan multikultural.

Dengan demikian, studi tentang praktek siyasah kedua dinasti ini tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi politik Islam, tetapi juga memperlihatkan dinamika hubungan antara agama, kekuasaan, dan masyarakat dalam sejarah panjang peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kennedy, Hugh. (2016). *Kekhalifahan: Pemerintahan Islam dari Masa Nabi hingga Abbasiyah*. Diterjemahkan dari *The Prophet and the Age of the Caliphates*. Diakses dari: <https://www.goodreads.com/book/show/25736586-the-prophet-and-the-age-of-the-caliphates>
- Lapidus, Ira M. (2014). *Sejarah Masyarakat Islam: Sejak Masa Nabi hingga Abad ke-20*. Cambridge University Press. Diakses dari: <https://archive.org/details/historyofislamicsocieties>
- Donner, Fred M. (2010). *Muhammad dan Para Pengikutnya: Awal Mula Islam*. Harvard University Press. Diakses dari: <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674050976>
- Hitti, Philip K. (2002). *Sejarah Bangsa Arab: Sebuah Kajian Menyeluruh*. Palgrave Macmillan. Diakses dari: <https://archive.org/details/HistoryOfTheArabsPhilipK.Hitti>